



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB UNIT KERJA : BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI MARTONO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3. NHH : 217963

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m ² /110 m ² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m ² /60 m ² di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	215.000.000
1. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
3. MOTOR, HONDA CBR 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	136.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.573.535
F. HARTA LAINNYA	Rp.	48.000.000
Sub Total	Rp.	2.219.073.535
III. HUTANG	Rp.	390.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.829.073.535

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang



diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.